

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS KETERLAMBATAN SAMPAINYA BARANG PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pengiriman barang tersebut tidak selamanya berjalan lancar, salah satunya adalah apabila terjadi keterlambatan sampainya barang di tempat tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pihak perusahaan. Dalam kegiatan bisnis yang sehat harus terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa pengiriman barang, 2. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan jasa pengiriman barang dalam hal keterlambatan penerimaan barang yang dikirim menurut UU No 8 Tahun 1999. Sedangkan tujuan untuk 1. Mengetahui hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa pengiriman barang, 2. Mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan jasa pengiriman barang dalam hal keterlambatan penerimaan barang yang dikirim menurut UU No 8 Tahun 1999.

Penelitian jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual digunakan di dalamnya. Dilengkapi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet serta teknik analisis kualitatif normatif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyediaan jasa pengiriman barang, bahwa kedudukan Hukum dalam Pengangkutan, pengiriman barang sebagai bentuk perjanjian kedua belah pihak bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) ; Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). 2. Perlindungan konsumen adalah Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keterlambatan diartikan sebagai sesuatu hal yang terlambat atau suatu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan menjadi tertunda tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengiriman Barang, dan Keterlambatan

ABSTRACT

DISPATCH SERVICE CONSUMERISM GOODS ON DELAY UNTIL IT IS PERSPECTIVE GOODS NUMBER LAW 8 YEARS 1999 ABOUT CONSUMERISM

That goods dispatch not all along well-oiled, one of it is if happening delay until it is goods at in conflict with location what does diperjanjikan by firm party. In activity carries on business that healthy has to exist protection balance sentences among consumer with producer.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How relationship sentence among service user and dispatch service provider goods, 2. Jurisdictional protection for user consumer services goods dispatch service in term goods acceptance delay that transferring to terminological UU No. 8 Years 1999. Meanwhile aim for 1. Know law relationship among service user and dispatch service provider goods. 2. Knowing jurisdictional protection for user consumer services goods dispatch service in term goods acceptance delay that transferring to terminological UU No. 8 Years 1999.

Normative juridical research with statute approach, case approach, and conceptual approach which used in it. Those are equipped with primary, secondary, and tertiary legal materials that already in literature and internet, and the analysis technique are qualitative, normative, deductive.

Result observationaling to point out 1. Relationship sentences among service user and penyedian is goods dispatch service, that legal status in Transportation, goods dispatch as shaped as agreement both of clefts party if be sighted from keperdataan's facet, can we point as overall it regulations, in and outside codification (Civil code (kuHPerdata) ; Law Merchant code (KUHD) one that bases and aim to manage published law relationship because goods move needs. 2. Consumerism is all effort secure to mark sense rule of law to give protection to consumer. Jurisdictional protection is a protection that is given to jurisdictional subject in shaped good law peripheral that gets preventif's character and also one gets repressive character, well that written and also unwritten. Delay diartikan as something of late thing or an unexploited performing according to plan of action so causing one or many activity become in conflict with been delayed time already being plotted.

Key word: Consumerism, Goods dispatch, and delay